

The Babcock & Wilcox Company
**Panduan Kepatuhan
Anti-Korupsi / Anti-Suap**



Para direktur, pejabat, dan pegawai dari *The Babcock & Wilcox Company* ("B&W" atau "Perusahaan") berkomitmen untuk mematuhi undang-undang anti-suap dan anti-korupsi dari semua negara dan wilayah di mana kami beroperasi atau memasarkan produk atau jasa. Dewan Direksi dan pemimpin tertinggi B&W sangat percaya dan ingin menegaskan kepada semua pegawai bahwa **cara bagaimana kita mencapai suatu hasil sama pentingnya dengan hasil itu sendiri**. Untuk membantu pegawai mematuhi undang-undang anti-korupsi dan melakukan usaha sesuai dengan Kode Perilaku Bisnis perusahaan kami dan standar etika tinggi kami, B&W menyediakan Panduan Kepatuhan Anti-Korupsi / Anti-Suap Ini.

Tujuan dari panduan ini adalah untuk memastikan bahwa pegawai dari *The Babcock & Wilcox Company* (B&W) dan mitra usaha patungan B&W, agen penjualan, perwakilan penjualan, *reseller*, konsultan, agen proses, dan perantara pihak ketiga lainnya (yang secara bersama-sama disebut sebagai "perwakilan") memahami persyaratan umum semua undang-undang global yang mengatur tentang korupsi dan suap seperti *U.S. Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) dan *U.K. Bribery Act* tahun 2010 serta posisi B&W berkenaan dengan kendali dan praktik anti-korupsi dan kepatuhan terhadap undang-undang anti korupsi. Panduan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari program kepatuhan B&W dan berfungsi sebagai alat pencegahan untuk membantu pegawai dan perwakilan dalam mengenali dan menghindari potensi konflik dan pelanggaran terhadap FCPA, *U.K. Bribery Act* dan undang-undang anti-korupsi setempat dari negara-negara di mana B&W beroperasi.

Kami juga ingin mengingatkan pegawai mengenai peran penting pengendalian internal dan sistem pelaporan keuangan kami dalam pencegahan dan deteksi korupsi. Evaluasi pengendalian internal berdasarkan Kerangka Terpadu Kendali Internal dari *The Committee of Sponsoring Organizations* (COSO). Kerangka COSO telah diperbaharui pada tahun 2013, yang menyebabkan lebih banyak bimbingan di sekitar desain dan implementasi pengendalian internal di Perusahaan. Ini meliputi, namun tidak terbatas pada, pembentukan pengendalian internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan seperti *U.S. FCPA* dan *U.K. Bribery Act* (keduanya dibahas secara lebih rinci dalam Pedoman ini). Pedoman ini memberikan informasi umum tentang pengendalian internal yang berkaitan dengan upaya anti-korupsi, seperti pembuatan pembukuan dan catatan yang akurat, praktik hadiah dan hiburan, praktik pembayaran dan praktik rekening bank. Setiap pegawai dan perwakilan Perusahaan harus menyadari perlunya pengendalian internal di sekitar undang-undang dan peraturan ini dan secara aktif berusaha untuk memastikan bahwa pengendalian ini ada dan berjalan dengan efektif.

UNDANG-UNDANG PRAKTIK KORUPSI LUAR NEGERI A.S. ATAU U.S. FOREIGN CORRUPTION PRACTICES ACT ("FCPA")

FCPA memiliki dua bagian. Bagian anti-suap berkaitan dengan suap kepada pejabat pemerintah luar negeri. Bagian kedua membahas persyaratan pencatatan dan pengendalian internal. Di bawah ini adalah ringkasan singkat dari setiap bagian:

Ketentuan anti-suap FCPA melarang:

- Memberikan, menawarkan, menjanjikan atau mengesahkan untuk membayar, sesuatu yang berharga
- Kepada seorang "pejabat pemerintah luar negeri"
- Dengan maksud untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis, atau
- Mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak benar
- Sehubungan dengan transaksi bisnis

Bagian anti-penyuapan FCPA menyatakan bahwa adalah suatu kejahatan apabila membayar atau menawarkan untuk membayar sesuatu yang berharga, secara langsung atau tidak langsung, kepada pejabat pemerintah luar negeri, kandidat politik atau siapa pun yang bertindak atas nama organisasi publik internasional, dalam rangka untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan bisnis yang tidak benar. Agar supaya disebut melanggar FCPA, sesuatu yang berharga tersebut tidak perlu harus berpindah tangan. Sebuah penawaran, skema atau janji untuk membayar atau memberikan sesuatu yang berharga (bahkan di masa depan) dapat disebut sebagai sebuah pelanggaran.

Ketentuan pengendalian akuntansi internal dan pencatatan dalam FCPA mewajibkan direktur, pejabat, pegawai, perwakilan, pemegang saham dan afiliasi dari B&W untuk mematuhi ketentuan FCPA yang mewajibkan:

- Pemeliharaan buku dan catatan yang secara akurat mencerminkan setiap transaksi; dan
- Pemeliharaan sistem pengendalian akuntansi internal.

Persyaratan untuk mencatat dengan benar semua transaksi secara adil dan akurat meliputi semua dokumen asli termasuk faktur, kwitansi dan laporan pengeluaran dan bukan hanya buku besar umum. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah perusahaan menyembunyikan praktik suap dan mencegah praktik akuntansi curang. Sebagai contoh, sebuah perusahaan tidak dapat mencatat suatu penyuaipan sebagai sebuah komisi untuk agen penjualan, sebuah upah konsultasi, atau sebuah "upah keberhasilan" bila diketahui dengan sebenarnya atau ada alasan untuk percaya bahwa pembayaran tersebut atau bagian dari pembayaran itu akan digunakan sebagai sebuah pembayaran yang tidak benar kepada seorang pejabat pemerintah. Kegagalan untuk mempertahankan sistem pengendalian internal atau memalsukan pembukuan dan catatan merupakan suatu tindak pidana berdasarkan FCPA dan tidak sesuai dengan persyaratan COSO 2013 yang mengharuskan Perusahaan memastikan pengendalian tersebut harus ada dan berjalan dengan efektif.

UNDANG-UNDANG SUAP INGGRIS ATAU U.K. BRIBERY ACT

Undang-undang Suap Inggris atau *U.K. Bribery Act* melarang penyuaipan pejabat pemerintah mirip dengan ketentuan anti-suap FCPA, namun tidak seperti halnya FCPA, *U.K Bribery Act* juga melarang penyuaipan komersial di sektor swasta. Selain larangan dalam FCPA, *U.K Bribery Act* juga:

- *Melarang segala bentuk suap*
- *Melarang memfasilitasi pembayaran*
- *Memberlakukan tanggung jawab pribadi kepada Warga Negara Inggris (pidana dan perdata)*

HADIAH DAN HIBURAN

Hadiah, hiburan dan makan-makan sering dianggap sebagai bentuk kesopanan dan merupakan hal yang umum dalam bisnis sehari-hari di banyak negara, tetapi dapat memiliki implikasi anti-korupsi. Undang-undang anti-korupsi melarang menawarkan atau memberikan sesuatu yang berharga, termasuk hadiah, hiburan dan makanan, kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut atau pengaruh yang tidak adil terhadap tindakan pejabat. Hadiah, hiburan atau makanan yang disediakan untuk pejabat pemerintah harus secara hati-hati dan secara proaktif ditinjau dan disetujui terlebih dahulu untuk menghindari pelanggaran terhadap hukum.



Demikian juga, penyediaan perjalanan dan penginapan kepada pihak ketiga dapat menyebabkan pelanggaran dan hanya diizinkan jika terkait langsung dengan promosi, peragaan atau penjelasan atas fasilitas, produk, layanan dari B&W, atau pelaksanaan lainnya dari sebuah kontrak. Semua permintaan untuk perjalanan dan penginapan untuk seorang pejabat pemerintah harus disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh Kepala Petugas Kepatuhan atau *Chief Compliance Officer*.

B&W tidak mentolerir korupsi dalam bentuk apa pun, atau pelanggaran terhadap FCPA atau undang-undang anti-suap dan anti-korupsi lain oleh pejabat, direktur, pegawai, atau perwakilannya. Kebijakan Perusahaan kami, Pedoman Perilaku Bisnis ("Kode") dan Etika dan Program Kepatuhan membahas berbagai kewajiban substantif yang dikenakan pada B&W dan semua Unit Bisnis untuk memastikan bahwa tidak hanya reputasi kami untuk transaksi yang jujur dan adil tetap utuh, tapi bahwa kami selalu melakukan hal yang benar. Persyaratan ini juga berlaku untuk entitas yang dimiliki atau dikendalikan (dengan alasan kepemilikan saham, manajemen atau lainnya) oleh B&W, termasuk kemitraan, usaha patungan dan konsorsium.

PRAKTIK BISNIS B&W

B&W memiliki prosedur uji tuntas yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sebelum penggunaan setiap "perantara pihak ketiga" -- agen, konsultan, perwakilan penjualan, *reseller* atau perwakilan pihak ketiga lainnya.

B&W bertanggung jawab atas tindakan wakil-wakilnya, termasuk mitra usaha patungan, apabila Perusahaan mengetahui atau seharusnya cukup mengetahui tentang tindakan pelanggaran hukum mereka. Berdasarkan FCPA, pejabat dan pegawai Perusahaan dapat bertanggung jawab atas pembayaran yang dilakukan kepada seorang pejabat luar negeri oleh pihak ketiga, seperti perwakilan penjualan, agen, *reseller*, konsultan atau mitra usaha patungan. Kewajiban dapat dikenakan tidak hanya ketika Perusahaan mengetahui transaksi ilegal tetapi juga ketika ternyata "menutup mata" terhadap indikasi bahwa pelanggaran mungkin terjadi. Dengan kata lain, jika pegawai B&W menunjukkan tindakan menutup mata yang disengaja terhadap, ketidaktahuan yang disengaja atas, atau mengabaikan dengan sadar atas tindakan atau keadaan, maka Perusahaan dapat dianggap mengetahui tentang transaksi tersebut. Fakta bahwa seorang perwakilan tertentu tidak dapat membuat dirinya sendiri tunduk terhadap FCPA adalah hal yang tidak relevan. B&W pegawai memiliki kewajiban untuk bertanya

apabila ada keadaan yang mengindikasikan bahwa seorang perwakilan mungkin telah bertindak atau akan bertindak melawan hukum.

Untuk melindungi B&W dan semua pegawainya, aturan berikut harus diikuti tanpa kecuali ketika menanggapi terhadap sebuah permintaan untuk pembayaran yang tidak tepat:

- Menolak untuk melakukan pembayaran tersebut dan menjelaskan bahwa B&W tidak melakukan pembayaran tersebut – ini bertentangan dengan FCPA, Kode Etik, kebijakan B&W No. 0200-14 Kepatuhan terhadap hukum Anti-Suap, dan kemungkinan besar, hukum setempat;
- Jelaskan bahwa penolakan tersebut bersifat mutlak dan bahwa tidak pernah ada bahasa tubuh atau pemahaman implisit untuk mengurangi kepatuhan penuh terhadap kebijakan dan undang-undang anti-suap / anti-korupsi;
- Segera laporkan permintaan untuk pembayaran yang tidak tepat tersebut kepada seorang anggota dari Departemen Etika dan Kepatuhan atau Departemen Hukum atau melalui saluran Integritas Perusahaan atau email rahasia di ethics@babcock.com;
- Jika seorang mitra usaha patungan atau perwakilan terlibat, jelaskan bahwa mereka tidak berwenang untuk melakukan pembayaran atas nama B&W dan B&W akan mengakhiri hubungan jika pembayaran dilakukan.

Karena sifat dan tingkat operasi luar negeri dari B&W, kepatuhan anti-suap dan anti-korupsi sangat penting bagi B&W. **Kepatuhan bukanlah sebuah pilihan; itu adalah suatu kewajiban.**

Dalam kasus di mana kepentingan B&W lebih dari pasif tapi kurangnya kepemilikan atau pengendalian yang cukup untuk memberlakukan kewajiban ini pada entitas atau usaha tertentu, B&W akan bekerja dengan entitas pengendali untuk mendukung penerapan persyaratan yang sama dengan yang diuraikan dalam panduan ini.

Demikian pula, dalam kasus di mana B&W memiliki hak suara sebesar 50% atau kurang pada suatu entitas dan tidak dinyatakan berhak melakukan kontrol operasional, FCPA mewajibkan B&W melakukan suatu upaya itikad baik untuk menjamin kepatuhan entitas tersebut terhadap pembukuan dan catatan FCPA serta ketentuan pengendalian akuntansi internal.

Kebijakan kami adalah bahwa kami harus mematuhi kata-kata dan semangat FCPA dan semua persyaratan hukum yang berlaku di Amerika Serikat, termasuk negara bagian atau subdivisi politik daripadanya, dan masing-masing negara luar negeri di mana kami melakukan bisnis, kecuali jika hukum AS melarang kepatuhan terhadap undang-undang luar negeri tersebut (seperti dalam kasus undang-undang luar negeri tertentu mengenai Boikot Liga Arab terhadap Israel).

Penting untuk dipahami bahwa dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang mengatur B&W, Dewan Direksi, atau komite yang ditunjuk daripadanya, memiliki sebuah kewajiban yang tegas, khusus dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa B&W terus sepenuhnya mematuhi standar-standar ini. Konsisten dengan hal tersebut, Komite Audit dan Keuangan dari Dewan Direksi telah menyatakan komitmennya untuk memastikan kepatuhan terhadap FCPA, Kode dan Etika dan Program Kepatuhan. Pedoman ini, bersama-sama dengan Kode, Etika dan Kebijakan Program Kepatuhan Nomor 0200-14 Kepatuhan terhadap Undang-undang Anti-Suap, dimaksudkan untuk memastikan bahwa B&W memenuhi kewajiban ini.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertentu yang mengatur B&W, termasuk FCPA, membawa denda dan hukuman pidana dan perdata yang sangat besar, termasuk, bagi pelanggar individu, penjara dan larangan untuk bekerja sebagai seorang pejabat atau direktur sebuah perusahaan publik, dan, bagi perusahaan, hilangnya keistimewaan ekspor dan larangan mendapatkan kontrak pemerintah.

Tujuan dari Pedoman ini adalah untuk memperkuat komitmen Dewan dan manajemen puncak kami terhadap kepatuhan anti-korupsi dan untuk menjelaskan kewajiban pegawai, mitra usaha patungan dan perwakilan B&W berdasarkan FCPA dan undang-undang terkait lainnya, dan untuk memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang mungkin timbul mengenai masalah ini. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk meminimalkan pentingnya ketentuan lain dari Kode atau Etika dan Program Kepatuhan. Dokumen ini juga tidak dimaksudkan agar pegawai bisa membuat penilaian hukum mengenai FCPA. Sebaliknya, dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan kepada pegawai, mitra usaha patungan dan perwakilan B&W mengenai gambaran hukum, dan membuat mereka menyadari kompleksitas dalam hukum, sehingga semua akan mengetahui kapan harus mencari berkonsultasi dengan Departemen Etika dan Kepatuhan atau Departemen Hukum.

Jika, setelah menjadi familiar dengan panduan ini, ada pertanyaan atau masalah tentang kegiatan yang sedang dalam pertimbangan atau kegiatan yang telah terjadi, silakan mendiskusikan masalah dan pertanyaan tersebut dengan departemen hukum lokal Anda atau perwakilan etika dan kepatuhan yang sesuai. Daftar kontak etika dan kepatuhan tercantum dalam website internal Perusahaan pada website etika dan kepatuhan. Anda juga dipersilakan untuk menghubungi Kepala Petugas Kepatuhan (*Chief Compliance Officer*) di ethics@babcock.com.

Bagi mereka yang ingin agar identitasnya tetap anonim, B&W membuka Saluran Integritas pihak ketiga global dan multi-bahasa secara penuh selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Siapa pun yang melaporkan keprihatinan dengan itikad baik akan dilindungi dari tindakan balasan berdasarkan Kode Etik dan Kebijakan Non Pembalasan B&W 0200-016 dan di sejumlah negara oleh undang-undang. Pegawai dan lainnya didorong untuk melaporkan potensi pelanggaran, pelanggaran yang dicurigai atau pelanggaran aktual dengan menghubungi nomor bebas pulsa yang sesuai yang tercantum di bawah ini atau melalui pelaporan web atau email:

888-475-0003	Amerika Serikat and Kanada
10-800-711-0999	China
10-800-110-0929	China
001-877-880-2975	Meksiko
0808-234-2980	Inggris
45-80-88-19-64	Denmark

Untuk mendapatkan kode Negara Akses Langsung untuk negara-negara yang tidak tercantum di atas, kunjungi:

<http://www.business.att.com/bt/access.jsp>

Ajukan pelaporan web di:

www.bwintegrityline.com

www.bweintegrityline.com hanya negara Uni Eropa

Melalui email di: ethics@babcock.com

PERTANYAAN DAN JAWABAN



Berikut ini adalah jawaban atas beberapa pertanyaan yang lebih umum tentang kewajiban kepatuhan tertentu serta FCPA:

A. UNDANG-UNDANG PRAKTIK KORUPSI LUAR NEGERI

Perilaku apa yang dilarang oleh ketentuan "suap" FCPA?

FCPA menyatakan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum bagi setiap perusahaan AS atau setiap pejabat, direktur, pegawai, agen atau pemegang saham yang bertindak atas nama perusahaan tersebut untuk secara korup menawarkan, membayar, berjanji untuk membayar, atau mengizinkan pembayaran, secara langsung atau tidak langsung melalui orang atau perusahaan lain, sesuatu yang berharga kepada seorang pejabat pemerintah luar negeri, partai politik atau pejabat atau calon pejabat partai tersebut, dalam rangka untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis.

Siapakah seorang Pejabat Pemerintah (Pejabat Pemberintah) berdasarkan Undang-undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS atau U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) itu?

Seorang Pejabat Pemerintah adalah orang sesuai dengan kriteria berikut ini, terlepas dari pangkat atau posisinya:

- Seorang pejabat atau pegawai dari setiap departemen pemerintah, lembaga, biro, otoritas atau perangkat lainnya dari pemerintah luar negeri, seperti perusahaan milik negara atau perusahaan yang dikendalikan oleh negara;
- Seorang pejabat atau pegawai dari organisasi yang disponsori pemerintah seperti PBB atau Bank Dunia;
- Seseorang yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama pemerintah atau departemen atau lembaga, atau perangkat dari pemerintah luar negeri, bahkan jika orang itu sebenarnya bukan merupakan seorang pejabat atau pegawai pemerintah;
- Seorang pegawai atau perwakilan dari suatu badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah (misalnya, seorang pegawai dari utilitas milik negara) atau di mana suatu badan milik pemerintah memiliki investasi di dalamnya.
- Seorang anggota atau pegawai dari cabang legislatif atau yudikatif, petugas pabean, petugas pajak, atau petugas pinjaman dari Bank Dunia; atau
- Calon untuk suatu jabatan politik, bahkan jika orang tersebut belum merupakan pejabat atau pegawai pemerintah, atau sebuah partai politik atau petugas partai.
- Setiap pegawai atau pejabat dari badan pemerintah, atau orang yang memegang suatu jabatan atau posisi di bawah hukum dari pemerintah atau seorang individu yang melakukan pekerjaan untuk badan pemerintah di bawah kontrak.

Siapakah Perwakilan itu?

Setiap "perantara pihak ketiga" yang berwenang untuk melakukan bisnis atas nama atau mewakili Perusahaan harus dianggap sebagai wakil untuk tujuan kepatuhan anti-korupsi. Contohnya meliputi agen penjualan, perwakilan penjualan, *reseller*, konsultan, mitra usaha patungan, petugas *clearance* bea cukai, petugas imigrasi dan perantara pihak ketiga lainnya. Kebijakan B&W mewajibkan semua perwakilan secara hati-hati disaring sebelum yang dipekerjakan oleh B&W, dan perwakilan diharapkan untuk mematuhi kebijakan ini dengan cara yang sama dan untuk tingkat yang sama seperti halnya petugas, direktur dan pegawai Perusahaan.

Apakah FCPA hanya mencakup suap?

Tidak, FCPA juga mencakup persyaratan mengenai pemeliharaan buku dan catatan Perusahaan dan anak perusahaan yang memadai, apakah transaksi asing terlibat atau tidak. Ketentuan pembukuan dan catatan FCPA mewajibkan Perusahaan membuat dan menyimpan buku, catatan dan akun yang secara rinci wajar cukup menjelaskan transaksi dan disposisi aset dan juga mewajibkan sistem pengendalian internal dipelihara untuk memberikan jaminan kelengkapan dan akurasi secara wajar. Ketentuan suap FCPA melarang penawaran atau pembayaran uang atau sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah luar negeri, partai politik luar negeri (atau petugasnya) atau setiap calon pejabat politik luar negeri dengan maksud atau tujuan "korup" untuk memperoleh, mempertahankan atau mengarahkan bisnis.

Apakah FCPA mencakup pejabat atau pegawai Amerika Serikat?

Tidak. Namun, ada hukum-hukum yang sangat ketat dan menyeluruh lainnya yang mengatur interaksi dengan pejabat pemerintah federal dan negara bagian AS, dan merupakan kebijakan Perusahaan bahwa hubungannya dengan pejabat pemerintah AS atau pegawai Amerika Serikat (dan hubungannya dengan pejabat atau pegawai pemerintah luar negeri) harus dilakukan dengan sedemikian rupa bahwa pengungkapan publik penuh atas suatu rincian tidak akan merusak citra atau membahayakan integritas atau reputasi Perusahaan. Kebijakan ini berlaku apakah dana Perusahaan atau dana atau aset pribadi terlibat dan juga berlaku untuk kontribusi atau pembayaran tidak langsung yang dilakukan melalui pihak ketiga. Selain itu, semua pegawai harus menyadari fakta bahwa undang-undang dan peraturan AS secara khusus dan ketat mengontrol pemberian hadiah dan hiburan kepada pegawai pemerintah AS dan kepatuhan terhadap pembatasan tersebut sangat penting.

Apakah ada persyaratan pelaporan internal mengenai hadiah dan hiburan yang disediakan oleh Perusahaan untuk pejabat dan pegawai pemerintah AS dan pejabat dan pegawai pemerintah luar negeri?

Ya. Hadiah kepada pejabat dan pegawai pemerintah AS sangat jarang diperbolehkan. Dalam kasus pejabat atau pegawai pemerintah luar negeri, hadiah tersebut mungkin diperbolehkan tergantung pada keadaan. Setiap hadiah tersebut memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kantor Penasihat Umum atau Kepala Petugas Kepatuhan.

Apakah FCPA bisa berlaku dalam situasi di mana B&W hanya memiliki kepentingan minoritas dalam sebuah operasi luar negeri?

Ya, bisa. Tentu saja, tingkat kepemilikan dan kendali (termasuk jumlah partisipasi oleh calon-calon dalam pengoperasian usaha) relevan dengan "pengetahuan" dan "otorisasi." Pertanyaan yang relevan meliputi apakah perusahaan AS mengelolal operasi sehari-hari atau hanya membaca laporan tahunan. Seperti disebutkan sebelumnya, masing-masing warga AS yang bekerja untuk usaha luar negeri tersebut bisa saja terkena kewajiban pribadi.

Apakah Perusahaan bertanggung jawab berdasarkan FCPA jika agen asing atau perwakilan penjualannya membayar suap kepada seorang pejabat pemerintah?

Perusahaan dapat bertanggung jawab jika tahu bahwa agennya akan membayar suap, tidak menghentikannya, dan dengan demikian secara implisit menyetujui suap tersebut. Cukupnya kesepengertian untuk membuat Perusahaan bertanggung jawab didefinisikan sebagai di antaranya keyakinan bahwa pembayaran yang tidak tepat tersebut "secara substansial" harus terjadi, atau bahwa ada "kemungkinan besar" itu akan terjadi. Seseorang tidak dapat menghindari kewajiban dengan melihat cara lain. Jika ada "**bendera merah**" yang menimbulkan pertanyaan, maka ada kewajiban untuk menanyakannya. Dalam situasi kelembagaan, **bendera merah** secara umum meliputi hal-hal berikut ini:

- Hubungan agen untuk entitas pemerintah atau pihak dalam kontrak:

Apakah agen itu sendiri adalah seorang pengusaha dengan status ganda sebagai pejabat pemerintah? Apakah agen terkait erat dengan pejabat pemerintah? Adakah perusahaan agen dimiliki sebagian oleh pejabat pemerintah atau keluarganya?

- Ukuran pembayaran ke agen:
Apakah pembayarannya berlebih sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan lain untuk layanan serupa? Apakah pembayarannya berlebih sehubungan dengan adat setempat atau hukum lokal untuk layanan yang sah?
- Sifat pembayaran kepada agen:
Apakah agen telah membuat komentar yang menyatakan bahwa uang dengan jumlah tertentu diperlukan agar ia bisa "mendapatkan bisnis," "membuat pengaturan yang diperlukan," dll.? Apakah ada indikasi kuat bahwa bisnis di negara tersebut hanya dapat diperoleh dengan menyuap pejabat?
- Layanan yang akan dilakukan oleh agen:
Apakah sah bagi agen untuk bertindak seperti itu di negara itu dan dengan kaitannya dengan kontrak itu? Apakah layanan agen benar-benar diperlukan, atau apakah layanan tersebut terkesan hanya untuk menutup-nutupi pembayaran yang dilarang?
Metode dan cara pembayaran kepada agen:

Apakah agen telah meminta seluruh atau sebagian dari pembayaran tunai atau instrumen pembawa? Apakah pembayaran tersebut akan dilakukan secara sebagian untuk orang atau perusahaan lain? Apakah pembayaran tersebut akan dilakukan di negara lain selain negara tempat layanan tersebut diberikan? Apakah agen telah meminta suatu dokumentasi palsu, misalnya, faktur palsu atau kegagalan untuk melaporkan pembayaran kepada otoritas fiskal negara tuan rumah?

Apakah FCPA hanya diterapkan dengan hubungan keagenan?

Tidak. Ketentuan suap FCPA melarang penawaran atau pembayaran sesuatu yang berharga. FCPA dapat diterapkan dalam situasi investasi, misalnya, di mana seorang pejabat pemerintah luar negeri mendapat peran ekuitas dalam sebuah usaha. Kebijakan perusahaan adalah bahwa tidak ada dana dari Perusahaan yang harus dibayarkan, dipinjamkan, diberikan, atau ditransfer, secara langsung atau tidak langsung, kepada pejabat pemerintah luar negeri (atau kepada setiap pejabat atau pegawai AS, negara bagian atau lokal), atau kepada setiap entitas di mana orang tersebut dikenal memiliki kepentingan materiil, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Penasihat Umum.

Dapatkah pejabat atau pegawai pemerintah luar negeri tetap bertindak sebagai konsultan?



Dengan persetujuan tertulis dari Kantor Penasihat Umum dan Kepala Petugas Kepatuhan, seorang pejabat atau pegawai pemerintah luar negeri dapat tetap melakukan layanan hukum, konsultasi atau layanan lainnya. Persyaratan yang sama berupa persetujuan tertulis dari Kantor Penasihat Umum berlaku untuk tetap dipekerjakannya pejabat dan pegawai AS, negara bagian, dan lokal. Dalam semua kasus, diwajibkan

bahwa harus ada kontrak tertulis yang menentukan sifat dan ruang lingkup layanan yang diberikan, dasar kompensasi dan penggantian biaya dan bahwa pembayaran oleh Perusahaan untuk layanan atau penggantian biaya tersebut harus dibuat hanya terhadap suatu pernyataan yang mengatur, secara rinci, sifat layanan yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan.

Semua usulan kontrak tersebut harus dilaporkan segera secara tertulis, termasuk rincian yang relevan daripadanya, kepada Kantor Penasihat Umum.

Bisakah penerapan FCPA diterapkan ketika pemerintah luar negeri melakukan privatisasi operasi?

Ya. Fakta bahwa sebuah perusahaan milik negara akan melalui privatisasi tidak berarti bahwa individu-individu luar negeri yang terlibat bukan lagi pejabat pemerintah. Situasi ini sangat khusus dan Anda harus berkonsultasi dengan Kantor Penasihat Umum. Membayar biaya perwakilan direktur asing, membayar perjalanan atau biaya per hari dan sejenisnya memerlukan persetujuan dari Kantor Penasihat Umum karena implikasi FCPA.

Apakah ketentuan anti-suap FCPA hanya berlaku untuk mendapatkan kontrak baru? Apakah ada pengecualian kecil di bawah FCPA?

Cakupan FCPA melampaui mendapatkan kontrak baru dan tidak ada pengecualian kecil. FCPA bisa mencakup pembayaran yang tidak tepat untuk mendapatkan keputusan pajak yang akan membuat syarat melakukan bisnis menjadi lebih menguntungkan. Ini juga berlaku untuk mempertahankan bisnis saat ini. Selain itu, Pemerintah AS telah menuntut seorang individu dan sebuah perusahaan atas pelanggaran FCPA berdasarkan pembayaran \$ 20.000 untuk seorang pejabat pemerintah luar negeri oleh sebuah perusahaan AS yang mencoba untuk menagih utang kepadanya.

Apakah kebijakan Perusahaan mengenai Memfasilitasi atau Mempercepat Pembayaran?

Pembuatan Memfasilitasi atau Mempercepat pembayaran oleh Perusahaan, pegawainya atau perwakilannya atas nama Perusahaan, secara tegas dilarang. Memfasilitasi Pembayaran tidak akan dilakukan oleh pegawai Perusahaan, atau oleh pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan, anak perusahaan dan perusahaan afiliasi.

Jika Anda melakukan pembayaran atau menyadari atau percaya bahwa pihak ketiga telah melakukan pembayaran yang bisa dianggap sebagai pembayaran untuk memfasilitasi atau mempercepat sebuah tindakan pemerintah rutin non-kebijaksanaan, Anda harus segera memberitahukan Kepala Petugas Kepatuhan dan memastikan pembayaran dicatat dan didokumentasikan dalam pembukuan dan catatan Perusahaan. Jangan pernah mencoba untuk menyamarkan pembayaran sebagai sesuatu yang lain. Hukuman untuk menyamarkan pembayaran tersebut jauh lebih besar daripada hukuman untuk membuat suatu pembayaran.

Apakah FCPA mengatur setiap situasi di mana sesuatu yang berharga dapat diberikan kepada seorang pejabat pemerintah luar negeri, partai politik, pejabat atau kandidat partai?

FCPA menyatakan bahwa FCPA akan menjadi pembelaan atas setiap tuduhan pelanggaran bahwa pembayaran, hadiah, penawaran atau janji sesuatu yang berharga tersebut merupakan pengeluaran yang wajar dan bona fide, seperti biaya perjalanan dan penginapan, yang dikeluarkan oleh atau atas nama pejabat tersebut dan langsung berhubungan dengan:

- promosi, peragaan, atau penjelasan produk atau jasa; atau
- pelaksanaan atau kinerja kontrak dengan pemerintah luar negeri atau lembaga daripadanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, biaya perjalanan, penginapan, makan dan hiburan yang wajar (tidak mewah atau berlebihan) dari pejabat pemerintah luar negeri dapat dibayar oleh Perusahaan dengan ketentuan bahwa tujuannya adalah dalam pengecualian promosi atau kontrak sebagaimana disebutkan di atas. Dianjurkan bahwa Perusahaan membayar secara langsung biaya ini (misalnya, membayar penerbangan atau hotel secara langsung) jika mungkin, daripada mengganti biaya kepada orang tersebut, dan disarankan untuk memberitahukan kepada pemerintah luar negeri tersebut bahwa biaya tersebut akan dibayar oleh Perusahaan. Dalam semua kasus, dokumentasi yang memadai harus diserahkan kepada Perusahaan sehubungan dengan permintaan untuk pembayaran tersebut. Dokumentasi tersebut harus menyatakan (i) apakah pengeluaran tersebut berkaitan dengan promosi, peragaan, atau penjelasan produk atau jasa atau berhubungan dengan pelaksanaan atau kinerja dari kontrak dengan pemerintah atau badan luar negeri; (ii) identifikasi dari orang-orang yang menerima manfaat atau pembayaran tersebut; (iii) jumlah yang terlibat; (iv) tata cara pembayaran; dan (v) konfirmasi bahwa pengeluaran tersebut tidak melanggar hukum setempat yang berlaku untuk pejabat tersebut atau kebijakan dari organisasi pejabat tersebut.

Personil diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan Kantor Penasihat Umum dan Kepala Petugas Kepatuhan sebelum melanjutkan untuk memikul tanggung jawab atas pembayaran yang masuk ke dalam kategori biaya yang diperbolehkan ini.

Dalam situasi-situasi yang tidak tercakup oleh pembelaan FCPA untuk biaya promosi yang dijelaskan di atas, apa kebijakan Perusahaan mengenai hiburan dan hadiah bisnis kepada pejabat pemerintah luar negeri?

Menurut FCPA, jika ada niat korup untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis, suatu hadiah, atau pembayaran biaya hiburan bisnis, berapa pun nilainya, bisa dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang.

Hadiah uang tunai kepada pejabat luar negeri benar-benar dilarang. Hadiah non tunai dapat dilakukan kepada pejabat asing hanya dengan persetujuan dari Kantor Penasihat Umum dan Kepala Petugas Kepatuhan, yang akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti: 1) apakah hadiah tersebut dapat ditafsirkan sebagai terkait dengan permintaan untuk tindakan pejabat atau terkait secara umum untuk menciptakan iklim usaha yang menguntungkan; 2) apakah hadiah tersebut memiliki nilai nominal dan diusulkan untuk diberikan sebagai rasa hormat,

terima kasih, ungkapan rasa syukur; 3) apakah sesuai dengan hukum dan kebiasaan negara luar negeri tersebut; dan 4) apakah ada pola pemberian hadiah rutin kepada orang yang sama. Dalam semua kasus, pengeluaran harus dicatat secara benar dan akurat dalam pembukuan dan catatan Perusahaan.

Sehubungan dengan fasilitas sosial dan hiburan bisnis pejabat pemerintah luar negeri, aturan kewajaran harus berlaku. Suatu perilaku memberikan hadiah rutin kepada seorang pejabat yang mengambil tindakan yang menguntungkan bagi Perusahaan akan sangat merepotkan meskipun tidak ada hadiah khusus yang secara langsung terhubung ke setiap tindakan tertentu dari pejabat tersebut. Selanjutnya, dalam SEMUA kasus (penggantian biaya wisata, hadiah, hiburan, dll.), harus ditegaskan bahwa pengeluaran yang dimaksud tersebut diperbolehkan baik berdasarkan hukum setempat dan peraturan dan pedoman badan / organisasi pemerintah dari pejabat tersebut, dan harus sesuai dengan adat istiadat setempat yang diterima secara umum. Pengeluaran tersebut harus dicatat secara benar dalam pembukuan dan catatan Perusahaan.

Apakah ada sebuah kebijakan Perusahaan mengenai prosedur untuk mempertahankan konsultan, agen dan perwakilan?

Ya. Pedoman Kebijakan Perusahaan berisi kebijakan yang harus diikuti sebelum konsultan, agen atau perwakilan atau Perantara Pihak Ketiga Internasional lainnya tetap dipertahankan. Kebijakan Kontraktor Independen B&W dan Kebijakan Perantara Pihak Ketiga memuat syarat-syarat yang harus dimasukkan dalam perjanjian ini, yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap FCPA serta hukum dan peraturan lainnya.

Apakah orang dengan tanggung jawab utama untuk pencairan dana Perusahaan tunduk pada kendali tertentu?

Ya, setiap petugas Perusahaan dan seluruh pegawai Perusahaan dengan tanggung jawab utama untuk pencairan dana Perusahaan diwajibkan setiap tahun untuk menyerahkan surat sertifikasi. Setiap individu yang telah dianggap sebagai "pegawai yang ditunjuk," diwajibkan setiap tahunnya untuk mengirimkan surat kepada Kepala Petugas Kepatuhan yang menyatakan bahwa, untuk tahun sebelumnya sepanjang pengetahuannya, tidak ada pelanggaran Pedoman Perilaku Bisnis, termasuk ketentuan yang termuat dalam Panudan Kepatuhan Anti-Korupsi / Anti-Suap, selain pelanggaran-pelanggaran yang, jika ada, sebelumnya telah dilaporkan atau yang tercantum dalam surat tersebut.

B. PERTANYAAN KEPATUHAN UMUM

Apa kebijakan Perusahaan mengenai pemeliharaan pembukuan dan catatan Perusahaan?

Catatan dan pembukuan akun Perusahaan harus secara akurat menjelaskan setiap transaksi yang dicatat di dalamnya. Tidak boleh ada entri palsu atau menyesatkan dalam pembukuan dan catatan Perusahaan untuk alasan apa pun. Tidak boleh ada pembayaran atas nama Perusahaan yang disetujui tanpa dokumen pendukung yang memadai atau yang dibuat dengan maksud atau pemahaman bahwa seluruh atau sebagian dari pembayaran tersebut akan digunakan untuk tujuan apa pun selain yang dijelaskan oleh dokumen pendukung pembayaran tersebut. Tidak

boleh ditetapkan dana atau aset yang tidak diungkapkan atau tidak tercatat untuk tujuan apa pun. Penggunaan aset Perusahaan untuk tujuan yang melanggar hukum atau tidak tepat sangat dilarang.

Kadang-kadang seorang wakil dari seorang konsumen atau supplier tidak ingin namanya tercatat pada rekening pengeluaran. Apakah diperbolehkan membayar untuk hiburan dari orang tersebut dengan mengambil uang tunai dari dana di luar pembukuan (off-the-books fund) atau dengan menulis cek untuk menguangkan dan menggunakan uang tunai tersebut untuk membayar hiburan tersebut dan kemudian mengenakan biaya transportasi atau sejenisnya untuk menghindari tercatatnya nama orang tersebut pada dokumentasi pengeluaran?

Tidak boleh. Pencatatan setiap dana di luar pembukuan sangat dilarang. Kebijakan perusahaan mengatur bahwa cek yang mewakili pencairan dana Perusahaan tidak akan dibayarkan untuk UANG TUNAI. Dokumentasi yang disampaikan dengan cara laporan pengeluaran harus lengkap dan akurat dengan menjelaskan tujuan sebenarnya dari pengeluaran tersebut. Kebijakan perusahaan akan dilanggar jika entri "Transportasi" digunakan untuk menutupi nama orang yang dibayari hiburan tersebut. Catatan dan pembukuan akun Perusahaan harus secara akurat menjelaskan setiap transaksi yang dicatat di dalamnya. Tidak boleh ada entri palsu atau menyesatkan dalam pembukuan dan catatan Perusahaan untuk alasan apa pun.

Apa kebijakan Perusahaan mengenai pemeliharaan rekening bank?

Semua rekening bank yang dibuat dan dikelola oleh Perusahaan harus atas nama entitas sesuai dengan tujuan pendiriannya. Harus diperoleh persetujuan tertulis sebelumnya untuk memelihara suatu rekening dengan nama selain entitas pendirian baik dari Kepala Petugas Keuangan dan Penasihat Umum B&W. Dalam keadaan apa pun, bisnis Perusahaan tidak boleh ditransaksikan melalui rekening bank pribadi pegawai. Nama individu pegawai tidak boleh digunakan atau tertulis dalam nama bank Perusahaan.

Semua pembayaran tunai yang diterima harus segera dicatat dalam pembukuan akun Perusahaan dan disimpan dalam sebuah rekening dipelihara atas nama Perusahaan pada bank atau lembaga lain yang disetujui oleh Kepala Petugas Keuangan B&W atau pejabat dengan tanggung jawab yang sama dari entitas yang menerima pembayaran tersebut. Tidak boleh ada dana yang dikelola oleh Perusahaan dalam bentuk mata uang yang bisa dinegosiasikan kecuali sejauh dibutuhkan oleh operasi bisnis secara normal. Administrasi dari seluruh rekening bank Perusahaan dan transaksi deposito dan penarikan uang tunai juga tunduk pada kebijakan, prosedur dan praktik yang ditetapkan dalam kebijakan perusahaan.

Semua penarikan atau pencairan dana Perusahaan harus dilakukan dengan cek, wesel atau transfer. Transfer ke sebuah rekening bank bernomor (yaitu, jenis rekening bank di mana nama pemegang rekening tidak diungkapkan), dilarang kecuali disetujui oleh Kepala Petugas Keuangan dan Kantor Penasihat Umum B&W. Pembayaran kepada perwakilan, konsultan atau agen luar negeri dengan transfer ke rekening bank bernomor dalam segala hal sangat dilarang. Cek, wesel, dll, yang mewakili pencairan dana Perusahaan tidak akan dibayarkan untuk "UANG TUNAI"; penerima pembayaran yang ditetapkan pada semua pemeriksaan adalah vendor atau supplier (atau penerima penunjukan sah yang berlaku) asal pembelian barang atau jasa tersebut.

Semua penarikan atau pencairan harus didukung oleh dokumentasi yang memadai sebagaimana yang didefinisikan dan dengan persetujuan wajib. Dalam kasus transfer ke rekening bank bernomor, yang mana telah disetujui, dokumentasi akuntansi harus secara jelas mengidentifikasi tujuan dan manfaat dari pembayaran tersebut.

Semua rekening bank harus dicatat dalam pembukuan. Semua rekening bank harus direkonsiliasi secara bulanan di bawah arahan dari Kepala Petugas Keuangan B&W atau yang ditunjuk.

Apakah Perusahaan memiliki prosedur untuk memastikan penagihan akurat kepada konsumen?

Ya. Semua penjualan barang atau jasa oleh Perusahaan akan ditagih secara tepat waktu (sesuai dengan ketentuan kontrak) kepada konsumen sesuai faktur dalam bentuk hard copy atau dengan menyampaikan faktur melalui transmisi elektronik. Faktur yang dikirim ke konsumen harus menjelaskan, secara rinci wajar, barang atau jasa yang terlibat dan jumlah yang benar yang terutang kepada Perusahaan. Setiap jumlah tertagih yang dilakukan refund (pengembalian) harus diidentifikasi pada faktur.

Apakah Perusahaan memiliki prosedur untuk melindungi terhadap faktur palsu untuk Perusahaan?

Ya. Setiap pembayaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan harus didukung oleh dokumentasi yang menjelaskan tujuan pembayaran tersebut. Semua pembayaran biaya untuk konsultan, pengacara, agen, perwakilan dan perantara pihak ketiga lainnya harus dilakukan dengan cek, wesel, atau transfer yang ditarik sesuai perintah pihak yang berhak daripadanya.

Apa kebijakan Perusahaan tentang pegawai Perusahaan yang menerima hadiah, pembayaran dan hiburan?

Kecuali untuk penghormatan umum sebagaimana yang dijelaskan selanjutnya, petugas atau pegawai Perusahaan tidak boleh meminta atau menerima hadiah pribadi, pembayaran, biaya, layanan, hak istimewa yang berharga, liburan, atau perjalanan tanpa tujuan bisnis, pinjaman (selain pinjaman konvensional dari lembaga pinjaman), atau bantuan lainnya dari setiap orang atau organisasi bisnis yang melakukan atau berusaha untuk melakukan bisnis dengan, atau merupakan pesaing dari, Perusahaan. Tidak pernah diperbolehkan untuk menerima hadiah uang tunai atau setara kas (misalnya, saham atau bentuk surat berharga lainnya) dengan jumlah berapa pun. Tidak boleh ada pegawai yang menerima apa pun yang berharga sebagai imbalan untuk rujukan pihak ketiga kepada setiap orang atau organisasi bisnis tersebut. Pegawai yang ditunjuk diwajibkan setiap tahun untuk mengesahkan kepatuhan terhadap Kebijakan Hadiah, Hiburan, Makan-makan Bisnis dan Perjalanan B&W.

Perusahaan mengambil posisi yang sangat ketat mengenai hadiah, layanan atau pertimbangan apa pun dari supplier. Hiburan dengan biaya pemasok harus dibatasi hingga penerimaan penghormatan umum yang biasanya terkait dengan praktik bisnis yang diterima untuk pegawai dan anggota keluarganya.

Diakui bahwa di negara-negara tertentu, penolakan hadiah pribadi dengan nilai yang melebihi praktek bisnis yang diterima di Amerika Serikat dapat mengakibatkan situasi bisnis yang canggung. Kepatutan pegawai yang menyimpan hadiah berharga tersebut untuk penggunaan pribadi bukannya menyerahkannya kepada Perusahaan harus diselesaikan dalam setiap kasus dengan Penasihat Umum atau Kepala Petugas Kepatuhan.

Apakah kebijakan Perusahaan melarang segala pemberian hadiah atau uang untuk perwakilan dari konsumen atau supplier pribadi?

Kebijakan perusahaan melarang setiap pembayaran dengan sesuatu yang berharga, yaitu, uang, tunai, cek atau lainnya, kepada perwakilan konsumen atau pemasok untuk mendapatkan manfaat apa pun. Pemberian hadiah musiman atau hadiah barang-barang promosi, atau pemberian makanan atau hiburan bisnis yang wajar, kepada pejabat, pegawai atau perwakilan dari setiap konsumen atau *supplier* pribadi diperbolehkan, jika: 1) hadiah, bantuan, makan atau hiburan tersebut sesuai dengan praktik bisnis yang biasa di tempat di mana hadiah, bantuan, makan atau hiburan tersebut diberikan; 2) hadiah, bantuan, makan atau hiburan nilainya tidak berlebihan dan tidak dapat dianggap sebagai suap atau imbalan; 3) hadiah, bantuan, makan atau hiburan tersebut tidak melanggar hukum atau standar etika yang berlaku; 4) hadiah, bantuan, makan atau hiburan tersebut tidak akan merusak citra Perusahaan atau pegawai jika diungkapkan kepada publik; 5) pengeluaran tersebut didokumentasikan secara akurat; dan 6) pengeluaran tersebut tidak melanggar hukum setempat atau kebijakan dari organisasi penerima.

Tidak mungkin untuk menentukan apa yang dianggap sebagai hadiah, bantuan, makanan atau hiburan yang bisa diterima di setiap kesempatan dan pegawai harus menggunakan penilaian yang baik dalam semua kasus. Pertanyaan dapat diajukan ke Penasihat Umum atau Kepala Petugas Kepatuhan. Setiap pegawai yang diminta untuk mengatur, atau dengan cara apa pun berpartisipasi dalam, pembayaran dana Perusahaan, atau sesuatu yang berharga kepada setiap pejabat, pegawai atau perwakilan dari setiap konsumen atau *supplier* harus segera meminta saran kepada Penasihat Umum atau Kepala Petugas Kepatuhan. Pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan kecuali didukung oleh bukti dokumen persetujuan dari Penasihat Umum atau Kepala Petugas Kepatuhan.

Kebijakan perusahaan mewajibkan bahwa setiap pegawai melaporkan setiap pengeluaran hiburan bisnis dan hadiah musiman atau hadiah barang-barang promosi dan nilai daripadanya yang dibuat untuk setiap pejabat, pegawai atau perwakilan dari setiap konsumen atau *supplier* yang melebihi batas kebijakan yang dapat diterima.

Apa kebijakan Perusahaan mengenai kontribusi politik?

Merupakan kebijakan Perusahaan bahwa dana Perusahaan, maupun nama perusahaan, tidak boleh digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk tujuan politik atas nama calon untuk jabatan politik, partai politik, atau pemegang jabatan *incumbent* terpilih di tingkat federal, negara bagian, atau lokal kecuali diizinkan oleh hukum yang berlaku. Setiap kontribusi yang diperbolehkan harus disetujui oleh Penasihat Umum dan harus dilaporkan kepada pegawai senior yang bertanggung jawab untuk operasi Washington dan kepada Kepala Petugas Keuangan B&W atau yang ditunjuk. Setiap pinjaman, uang muka, atau pemberian jasa Perusahaan, fasilitas atau apapun yang berharga tidak boleh dilakukan untuk mendukung seseorang atau suatu pihak

kecuali diperbolehkan menurut hukum yang berlaku dan hanya dengan persetujuan tertulis dari Penasihat Umum dan pemberitahuan kepada kepala hubungan pemerintah B&W. Larangan ini mencakup praktik-praktik seperti pembelian tiket untuk makan malam politik atau acara penggalangan dana dengan dana Perusahaan dan penyediaan transportasi kepada calon atau partai politik.

Apa kebijakan Perusahaan mengenai tanda terima atas permintaan sumbangan politik?

Setiap pegawai yang diminta untuk menyumbang dana Perusahaan, atau memberikan hiburan, hadiah, gratifikasi, atau sesuatu yang berharga melalui penggunaan dana, layanan, atau fasilitas Perusahaan sehubungan dengan kampanye politik atau aktivitas politik dalam suatu cara atau jumlah yang menurut pegawai tersebut dicurigai bahwa dana Perusahaan tersebut akan diperlukan untuk digunakan dalam rangka untuk menanggapi permintaan tersebut, harus segera memberitahukan kepada Kantor Penasihat Umum secara tertulis.

Apa kebijakan perusahaan mengenai pegawai yang berpartisipasi dalam kegiatan politik mereka sendiri?

Pegawai Perusahaan dapat dengan bebas melakukan kegiatan politik dalam kapasitas masing-masing, dengan ketentuan bahwa, sehubungan dengan kegiatan politik perorangan tersebut, tidak menggunakan fasilitas Perusahaan, personil, dana, nama perusahaan, atau dengan rujukan kepada setiap posisi yang dipegang oleh orang-orang tersebut di dalam Perusahaan, kecuali yang mungkin diperlukan menurut setiap hukum federal, negara bagian, atau lokal sehubungan dengan pengungkapan sumbangan politik individu. Pegawai yang melakukan sumbangan politik harus melakukannya dengan uang mereka sendiri tanpa memikirkan mendapatkan penggantian dari Perusahaan atau keuntungan atau manfaat bagi Perusahaan.

Bagaimana dengan penggunaan dana Perusahaan sehubungan dengan proposisi yang disampaikan kepada para pemilih atau pada undang-undang?

Perusahaan dapat menggunakan dana, fasilitas, dan personil untuk mendukung, menentang, atau mengambil posisi publik sehubungan dengan proposisi yang diajukan untuk persetujuan publik, hal-hal nonpartisan lain atau undang-undang yang mempengaruhi Perusahaan, pegawai, atau pemegang saham. Semua penggunaan tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Penasihat Umum dan pemberitahuan kepada kepala hubungan pemerintah B&W.

Apakah diperbolehkan bagi Perusahaan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pegawai karena suatu sumbangan politik yang dilakukan oleh pegawai tersebut?

Merupakan pelanggaran hukum Federal dan kebijakan Perusahaan apabila menggunakan dana atau aset Perusahaan untuk sumbangan politik federal dan baik hukum dan kebijakan akan dilanggar jika seorang pegawai menerima penggantian biaya oleh Perusahaan untuk sumbangan kampanye federal. Apakah dana Perusahaan dapat digunakan untuk pemilihan negara bagian atau lokal, dan apakah dana tersebut dapat digunakan untuk mengganti sumbangan yang dibuat oleh yang lain, tergantung pada hukum setempat dan semua pertanyaan tersebut harus dirujuk ke Penasihat Umum.

Bolehkah dana Perusahaan digunakan untuk sumbangan politik luar negeri?

Jawabannya tergantung pada hukum luar negeri dan pada Undang-undang Praktik Korupsi luar Negeri Amerika Serikat (*U.S. Foreign Corrupt Practices Act*) dan semua pertanyaan tersebut harus dirujuk ke Kantor Penasihat Umum. Setiap sumbangan tersebut memerlukan persetujuan tertulis dari Kantor Penasihat Umum.

Kesimpulan

Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk mencakup setiap dan semua situasi yang mungkin memicu pertanyaan mengenai FCPA atau hukum anti-korupsi atau anti-suap yang berlaku lainnya. Ini hanya mencakup beberapa pertanyaan yang lebih umum dan hanya membahas beberapa pengendalian internal terkait-anti-korupsi kami. Kami menekankan bahwa itu adalah kewajibang setiap pegawai untuk mematuhi FCPA, untuk menggunakan penilaian yang baik dan akal sehat dalam kegiatan bisnis mereka, dan dalam semua kasus, mematuhi prinsip-prinsip dasar kejujuran, integritas dan transaksi yang adil. Setiap kali pegawai merasa ragu tentang apakah perilaku yang diusulkan bisa melanggar FCPA atau hukum anti-korupsi atau anti-suap yang berlaku lainnya, wajib dikonsultasikan dengan Kantor Penasihat Umum dan Kepala Petugas Kepatuhan untuk memastikan bahwa perilaku yang diusulkan tersebut tidak melanggar hukum negara mana pun.

REFERENSI:

B&W Pedoman Perilaku Bisnis

B&W Kebijakan Etika & Kepatuhan

B&W Pedoman Etika & Kepatuhan

Kode Etik Kepala Petugas Eksekutif dan Pejabat Keuangan Senior